

BAB V

KESIMPULAN

Bab terakhir ini bertujuan menjelaskan rangkuman akhir dari semua hasil penelitian dan bab-bab yang penulis bahas sebelumnya tentang bagaimana strategi Robert Mugabe dalam menghadapi sanksi Barat akibat dari kebijakan *Fast Track Land Reform Programme*.

Berawal dari penjelasan mengenai sejarah awal terjadinya permasalahan rasisme, undang-undang pertanahan, politik, dan ekonomi Zimbabwe yang mengalami fluktuasi. Rhodesia Selatan, nama negara Zimbabwe sebelum kemerdekaan, awalnya ditemukan oleh seorang dari British (Inggris) yang bernama Cecil Rhodes. Rhodes merasa sangat tertarik dengan wilayah Rhodesia karena memiliki kekayaan alam yang berlimpah, seperti kaya akan mineral, bahan tambang, dan pertaniannya. Dari sinilah awal mula masyarakat kulit putih dari Eropa berdatangan ke wilayah Rhodesia Selatan (Zimbabwe) untuk mencari peruntungan, membangun tempat tinggal, dan menguasai tanah di sana.

Walaupun masyarakat kulit putih merupakan kaum minoritas di Rhodesia Selatan (Zimbabwe) pada saat itu, tetapi mereka berhasil menguasai perpolitikan dan tanah. Pembagian tanah pada saat itu sangat tidak adil bagi kaum kulit hitam. Masyarakat kulit putih mendapatkan tanah yang luas dan subur. Sedangkan, kaum kulit hitam mendapatkan tanah yang sempit dan tandus. Tanah yang didapatkan oleh kaum kulit putih berhasil diolah menjadi pertanian yang sukses. Hasil dari pertanian tersebut juga menjadi faktor berkembang pesatnya ekonomi Rhodesia

Selatan (Zimbabwe) pada saat itu. Karena warga pribumi kulit hitam tidak pandai mengolah pertanian, mereka pun bekerja pada pertanian milik kulit putih untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Adanya perasaan ditindas dan ketidakadilan yang dirasakan kaum kulit hitam membuat mereka melakukan aksi protes terhadap kulit putih. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menentang pemisahan kolonial dan akuisisi tanah yang tercantum dalam undang-undang pertanahan. Hal tersebut menghasilkan penyelesaian damai pada tahun 1979 yang ditengahi oleh pemerintah Inggris. Gencatan senjata yang diadakan di *Lancaster House*, Inggris ini sekaligus menjadi awal dari kemerdekaan Rhodesia Selatan (Zimbabwe).

Setelah Robert Mugabe berkuasa di Zimbabwe, ia berkomitmen untuk melakukan pembebasan warga kulit hitam Afrika, rekonsiliasi rasial, dan reformasi tanah bagi rakyatnya. Awalnya, permasalahan reformasi tanah sudah dilaksanakan pada tahun 1997. Namun, program tersebut dianggap Mugabe belum maksimal. Dari sinilah pencetus kebijakan *Fast Track Land Reform Programme* dibuat pada tahun 2000. Program reformasi tanah yang lebih radikal ini membuat negara-negara Barat, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia menjatuhkan sanksi terhadap negara Zimbabwe. Hal tersebut terjadi karena negara-negara Barat mendapati adanya tindakan intimidasi dan kekerasan dalam kebijakan *Fast Track Land Reform Programme*. Sanksi yang berupa pemberhentian bantuan dana ke Zimbabwe, embargo senjata, pembatasan perjalanan diplomatik dan pembekuan aset para pejabatnya, serta menarik investasi, membuat Zimbabwe mengalami krisis ekonomi yang parah. Negara-

negara Barat tersebut menargetkan individu dan perusahaan tertentu yang berpengaruh di Zimbabwe. Sanksi dari Uni Eropa juga menargetkan individu tertentu, baik di dalam pemerintah Zimbabwe dan yang terkait dengannya.

Melihat realitas adanya ketidakstabilan politik, ekonomi yang memburuk, dan dikucilkan oleh komunitas internasional akibat dari adanya kebijakan *Fast Track Land Reform Programme*, membuat Robert Mugabe mencanangkan strategi penerapan kebijakan *Look East* pada tahun 2003 demi bertahan dari krisis ekonomi yang dihadapi Zimbabwe. Mugabe berpaling ke negara-negara Timur, karena didasarkan pada keyakinan, bahwa lebih baik untuk menemukan kelompok sekutu baru yang akan terlibat dengan Zimbabwe tanpa khawatir tentang politik dalam negerinya, daripada mencoba menjilat dengan negara-negara yang berusaha hanya untuk melemahkan negara Zimbabwe. Mugabe pun merealisasikan strategi menghadapi sanksi-sanksi Barat dengan menerapkan kebijakan *Look East* tersebut dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara-negara Timur, seperti Indonesia, India, Iran, dan Cina.

Apa yang menyatukan negara-negara ini adalah bahwa mereka cenderung memiliki hubungan yang ambivalen atau bermusuhan dengan negara-negara Barat. Mugabe telah mengklaim bahwa sejarah kolonial mereka yang serupa membuat negara-negara ini menjadi sekutu yang lebih baik untuk Zimbabwe daripada negara-negara Barat. Dia juga menekankan bahwa negara-negara Timur ini telah makmur meskipun tanpa bantuan ekonomi dan politik dari Barat. Alih-alih dilemahkan oleh pengalaman, negara-negara Timur ini telah muncul sebagai pesaing ekonomi yang signifikan bagi negara-negara Barat. Strategi yang dibuat

oleh Robert Mugabe melalui kebijakan *Look East* ini telah membantu Zimbabwe tetap bertahan menghadapi lawan-lawannya.